

## Penyuluhan Pemahaman Nasionalisme Pada Mahasiswa Politeknik Bengkalis

**Imam Ghozali**

STAIN Bengkalis

[imamghozaliokemas@gmail.com](mailto:imamghozaliokemas@gmail.com)

Submitted: 2021-10-11 | Revised: 2021-12-03 | Accepted: 2021-12-20

**Abstract.** The aim of this study is to knowing the urgency of counseling on nationalism to new students at Bengkalis Polytechnic. The diversity of high-level advanced education backgrounds such as Madrasah Aliyah, High School and High School of Economics and Mechanical Engineering Schools gives birth to differences in understanding the meaning of nationalism and religion in the relationship between religion and politics such as the history of the Republic of Indonesia and the role of the ulama who fought for it, ideological harmony Pancasila with religion, and the harmony of constitutional laws with religion and the harmony of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a state system with religion. Various religious understandings have wild potential for the teachings of Islam itself, both in religious life, socio-cultural life and politics. This research is a field research using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that there is a need for regular counseling to students regarding the understanding of nationalism due to a lack of understanding of the history of the founding of the Indonesian state and the relationship between religion and the state. this is a gap for understanding of radicalism to develop among students

**Keywords:** Nationalism, students, radicalism, religious guidance

**Abstrak.** Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui urgensi penyuluhan pemahaman nasionalisme terhadap mahasiswa baru Politeknik Bengkalis. Keberagaman latarbelakang pendidikan lanjutan tingkat atas seperti Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Ekonomi Atas serta Sekolah Teknik Mesin melahirkan perbedaan pada pemahaman terhadap makna nasionalisme dan agama dalam hubungan antara agama dan politik seperti sejarah berdiri NKRI dan peran para ulama yang memperjuangkannya, keserasian ideologi Pancasila dengan agama, dan keserasian hukum-hukum konstitusi dengan agama serta kerasian NKRI sebagai sistem negara dengan agama. Beraga pemahaman agama mempunyai potensi liar terhadap ajaran agama Islam itu sendiri baik dalam kehidupan keagamaan, kehidupan sosial-budaya dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penyuluhan secara berkala terhadap mahasiswa berkaitan pemahaman nasionalisme

akibat kurang memahami sejarah berdirinya negara Indonesia dan hubungan agama dan negara. hal ini menjadi celah bagi pemahaman radikalisme untuk berkembang di kalangan mahasiswa

**Kata Kunci** : Nasionalisme, mahasiswa, radikalisme, bimbingan agama

## Pendahuluan

Agama sebagai pedoman hidup bagi umat manusia mempunyai pengertian beragam dari bahasa-bahasa yang berbeda. Dalam bahasa Arab agama dikenal dengan istilah “*din*” yang mempunyai arti undang-undang atau hukum yang berasal dari Tuhan. Bahasa latin menggunakan kata “*religion*” yang mempunyai arti mengumpulkan atau membaca.<sup>1</sup> Kedua istilah tersebut mempunyai arti berbeda, namun sebenarnya mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa agama adalah kumpulan firman Tuhan yang terdokumentasi dalam kitab suci sebagai panduan hidup umat manusia agar bisa hidup dengan baik selaras dengan keinginan-nya agar selamat Dunia dan Akherat.

Pesan-pesan dalam kitab suci tersebut merupakan suatu ajaran yang pasti ada dalam firman-firman-Nya yang bersifat sakral dan berisi pesan-pesan moral kehidupan manusia dan kehidupan setelah kematian dalam rangka membangun keselarasan hidup, sehingga manusia bisa membangun suatu peradaban di dunia dengan ajaran-ajaran Tuhan yang mampu memanusiakan manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Pesan-pesan nilai-nilai kebaikan dalam agama juga menjadi bagian kurikulum peendidikan agar kebaikan-kebaikan tersebut terapkan dan menjadi jalan hidup yang benar seperti di Politeknik Bengkalis. Sebagai suatu perguruan tinggi vokasi negeri di kabupaten bengkalis, mata kuliah agama merupakan mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa dari seluruh latarbelakang agama yang berbeda-beda dengan materi agama sesuai dengan agama mahasiswanya. Pemberlakuan keberagaman agama ini dalam rangka membangun semangat beribadah dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai inti ajaran agama yang saling menyayangi, menghormati dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

Namun berkaitan dengan persoalan hubungan agama dan politik, mahasiswa Politeknik Bengkalis tidak sepenuhnya memahami agama dengan baik sebagaimana makna agama di atas. Mereka berpandangan beragam dalam menyikapinya. Ada sebagian yang beranggapan bahwa politik merupakan sesuatu yang berdiri sendiri dan lepas dari agama, ada yang berpandangan

---

<sup>1</sup> Martin Putra Perdana Achmad Reza Hutama AL-Faruqi, “Problem Pluralisme Agama Di Indonesia,” *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2021): 64–70.

<sup>2</sup> Ellya Rosana, “Agama dan Sekularisasi Pada Masyarakat Moderen,” *Al-Adyan* 13, no. 1 (2018): 135–51.

bahwa agama dan politik saling membutuhkan, ada juga yang berpandangan bahwa agama dan politik merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Akibatnya, sebagian mahasiswa menilai bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sistem yang belum sesuai dengan sistem politik Islam yaitu sistem khilafah.

Secara teori pemahaman hubungan agama dan negara dibagi menjadi tiga: pertama, kelompok Islam yang memandang politik dan agama menjadi satu-kesatuan. Berbicara agama berarti berbicara politik sebagai bagian dari hukum Allah s.w.t.<sup>3</sup> Atas dasar pemikiran tersebut, mereka menghukumi orang-orang atau kelompok politik yang berseberangan dengan kalimat kafir dan halal dibunuh, sehingga sering disebut neo-khawarij.<sup>4</sup> Bahkan dalam sistem demokrasi, mereka pun masuk dengan menjual isu-isu agama dan *khilafah islamiyah*.<sup>5</sup> Kedua kelompok yang berpandangan simbiosis yaitu agama dan negara mempunyai wilayah sendiri-sendiri namun keduanya saling membutuhkan dan saling menguatkan. Ketiga, kelompok yang berpandangan bahwa agama menyiapkan nilai-nilai spiritual, sedangkan negara menyiapkan procedural operasional dalam hukum dan peraturan-peraturan.<sup>6</sup>

Beberapa penelitian mengenai gerakan radikalisme sudah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya antara lain: Maskyuri Bakri telah meneliti berkaitan dengan progresivitas kelompok penganut ideologi transnasional dan sangat militant dalam melakukan kaderisasi sehingga mampu menguasai lembaga-lembaga strategis baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Namun disisi lain, kelompok yang sering disebut sebagai pembela nkri seperti NU justru kurang bisa menembus pada tataran tersebut.<sup>7</sup> Sidi Ritaudin menyoroti pada sisi akar persoalan terjadi radikalisme sebagai perwujudan dari rekayasa politik global yang berbuntut pada pembantaian masyarakat Irak, keganasan ISIS dan pembunuhan sadis terhadap masyarakat palestina yang tidak serta merta atas kesalahan umat Islam semata.<sup>8</sup> Masdar Hilmy meneliti organisasi politik bawah tanah yang tidak mencerminkan sebagai gerakan politik Islam Indonesia. ia justru ingin menampilkan eksklusivitas terhadap sebagai politik identitas dan memberangus model politik moderat yang dikembangkan oleh

---

<sup>3</sup> Hairul Puadi, "Radikalisme Islam : Studi Doktrin Khawarij," *Jurnal Pusaka*, 2016, 43–53.

<sup>4</sup> Universitas Halu and Oleo Kendari, "Ideologi , Keyakinan , Doktrin dan Bid 'Ah Khawarij : Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern" 27 (2016): 411–30.

<sup>5</sup> Imam Ghozali, "Memahami Format Demokrasi Model Khawarij di Indonesia ( Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2019 )," 2019, 17–25.

<sup>6</sup> Munawir Sadjali, "Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran," in *UI-Press* (Jakarta, 2011), 140.

<sup>7</sup> Maskuri Bakri, "Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gempuran Aliran Fundamental; Telaah Kritis Radikalisme Intoleran Dan Pudarnya Moderatisme Islam," *Tribakti* 32, no. 1 (2021): 17–34.

<sup>8</sup> M Sidi Ritaudin, "Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global" 8 (2001): 389–414.

ormas terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah.<sup>9</sup> Dirana Sofiah meneliti tentang organisasi intra sekolah di sebagian sekolah di Jakarta menjadi pintu masuk virus radikalisme berkembang biak, yaitu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas, peneliti mengambil aspek penelitian pada urgensi penyuluhan paham nasionalisme di kalangan mahasiswa Politeknik Bengkalis semester pertama yang disisipkan pada setiap perkuliahan. Pola ini menjadi penting atas dasar pola yang dilakukan oleh kelompok radikalisme secara terus-menerus melalui berbagai pertemuan intensif dan kaderisasi secara terus-menerus. Itu sebabnya, pola penyuluhan pun dilakukan dengan cara sama yang dilakukan secara progresif, dinamis dan sistematis melalui pola yang lebih efektif dalam sistem perkuliahan pada setiap pertemuan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hubungan Islam dan Nasionalisme**

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada para nabi mulai dari nabi adam sampai nabi Muhammad s.a.w. secara substansi ajarannya sama, yaitu men-tauhid-kan Allah s.w.t. namun setiap pergantian nabi dan rasul, ada ajaran-ajaran syariat Islam yang mengalami perubahan terutama berkaitan dengan tata cara ritual keagamaan dan hubungan sosial. Ajaran Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad merupakan agama tauhid, sebagai tindak lanjut dari misi kenabian nabi Ibrahim as. Sebagai agama tauhid dalam konteks sosial, bermakna bahwa sesama manusia mempunyai derajat yang sama dan tidak menjadikan status sosial sebagai pemicu kesenggangan di antara mereka.<sup>11</sup> Islam bukan sebatas ajaran ritual, namun juga mengajarkan tentang kehidupan sosial dalam rangka membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan adanya peredaran ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, dan tidak boleh hanya pada kelompok-kelompok kapitalis.<sup>12</sup> Karena ekonomi Islam bukan semata-mata pada penumpukan harta, namun adanya distribusi yang merata kepada kelompok-kelompok yang berhak yang telah diatur dalam hukum Islam yaitu kelompok fakir dan miskin. Disini, ekonomi bukan sebatas urusan

---

<sup>9</sup> Masdar Hilmy, "Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2014): 1, <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>.

<sup>10</sup> Dirana Sofiah Suryaningrum, "Pandangan Anggota Rohis Sma Tentang Radikalisme Agama (Studi Komparatif Rohis Sma Labschool Jakarta dan SMKN 26 Jakarta di Rawamangun)," *Risenologi* 2, no. 2 (2017): 90–97.

<sup>11</sup> Nurcholish Madjid, "Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan" (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 38–39.

<sup>12</sup> Asghar Ali Engineer, "Islam Dan Teologi Pembebasan, Penerjemah; Agung Prihantoro" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 33.

persoalan pengaturan ekonomi saja, tapi ada sisi kemanusiaan yang bersumber dari syariat Islam.<sup>13</sup>

Syariat Islam berkaitan muamalah (kehidupan sosial) mempunyai porsi pembahasan yang sangat besar sehingga memerlukan suatu ijtihad untuk melahirkan suatu sistem kehidupan yang memberi kemanfaatan bukan saja umat Islam, juga non-muslim sebagai bagian komunitas masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu hasil ijtihad yaitu bentuk suatu negara sebagaimana di Indonesia yaitu *nation-state* atau negara bangsa. Pada referensi Islam, kata *ummah* merupakan konsep masyarakat tanpa batas teritorial sebagai wujud dari “*ummatan wahidah*”. Makna ini akan menjadi persoalan apabila ditarik pada konsep politik yang menginginkan kekuasaan tunggal sebagaimana para pejuang khilafah seperti HTI dan ISIS. Namun ketika *ummah* diartikan sebagai kesatuan dalam makna aqidah dan keyakinan satu agama, maka kehidupan bermasyarakat dengan dibatasi oleh batas-batas geografis sebagai wujud *nation-state* merupakan solusi dalam kehidupan masyarakat yang heterogen sebagaimana di Indonesia.<sup>14</sup>

Jadi pemaknaan *ummah* harus dimaknai sebagai masyarakat yang dibatasi oleh geografis dalam konteks berbangsa dan bernegara dan dimaknai sebagai kesatuan dalam satu agama yang melepaskan diri dari ikatan-ikatan batas geografis. Namun, berkaitan dengan hak-hak sosial yang melekat pada diri masing-masing manusia bagian dari hak-hak yang harus dipertahankan dan orang lain tidak boleh merampasnya walaupun dalam satu agama dan keyakinan. Dari sini kemudian makna *maqasyid syariah* (tujuan syariah Islam) bahwa menjaga jiwa dan harta bagian dari jihad bagi setiap orang. Karenanya, ketika ini ditarik dalam konteks berbangsa dan bernegara, mempertahankan kedaulatan negara merupakan suatu kewajiban, dan bagian dari jihad yang harus ditegakan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh nu melalui resolusi jihad.<sup>15</sup>

### Nasionalisme di Kalangan Mahasiswa

Nasionalisme adalah komitmen menerima *nation state* atau negara bangsa. Konsep ini berangkat dari nilai-nilai universal yang terangkum dalam Al-Qur'an bahwa setiap masyarakat atau bangsa wajib membela diri dari perbuatan diskriminasi, mempunyai hak untuk merdeka dan tidak boleh ada perbudakan serta membangun keharmonisan terhasap sesama manusia serta mempertahankan negara nya ketika mendapatkan ancaman baik dari internal

---

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd, Qadzif, Pencurian,” in *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 1–742.

<sup>14</sup> Robitul Firdaus, “Nasionalisme ‘Jalan Tengah’: Mengurai Potensi Benturan Ideologi Nasionalisme Dan Sentimen Ummah di Era Nation State,” *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2018): 307, <https://doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1105>.

<sup>15</sup> Amin Farih, “Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri),” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 251, <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.

maupun eksternal bangsa.<sup>16</sup> Nasionalisme sebagai komitmen untuk hidup bersama dalam keberagaman suku, etnis, budaya dan agama mengalami kristalisasi politik ketika wahid hasyim mengusulkan perubahan sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup> Perubahan ini selain karena fakta bahwa perjuangan kemerdekaan merupakan perjuangan seluruh masyarakat, juga dalam pandangan agama urusan politik dan negara bukan bagian dari *ushul al-din*, yang memberi peluang pemikiran politik dan negara selalu berkembang dan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kesepakatan masyarakatnya.<sup>18</sup>

Pada era digital dan bebasnya informasi sangat sulit, memperkenalkan konsep nasionalisme sangat penting di kalangan mahasiswa. Beberapa konsep nasionalisme yang harus diketahui oleh mahasiswa yaitu: *Pertama*, mengenal dengan baik para pejuang kemerdekaan yang beragam suku, etnis dan agama agar supaya terbuka pandangan inklusifitas dalam berbangsa dan bernegara. *Kedua*, mengenal dengan baik ideologi Pancasila merupakan ideologi yang dirancang oleh para ulama dan substansinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan agama-agama lain. *Ketiga* sistem *nation state* merupakan bagian sistem negara sebagai bentuk kesepakatan yang sama dengan sistem-sistem sebelumnya seperti khilafah, kerajaan dan kesultanan. Dan keberagaman tersebut tidak pertentangan dengan hukum Islam.

Perjuangan para pendiri bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya dan agama seperti : K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan, Wolter Mongisidi, dan Kapitan Patimura. Mereka mempunyai semangat sama yaitu ingin merdeka dari penjajahan Belanda. Sejarah para pejuang yang beragam ternyata tidak sepenuhnya diketahui oleh para mahasiswa. Berikut ini temuan penelitian tentang pengetahuan para pendiri bangsa dan negara Indonesia:

No	Jawaban Responden	Prosentase
1	mengenal dengan baik	76,2%
2	kurang mengenal	23,8%
3	tidak mengenal	0%

<sup>16</sup> Ridhouh Wahidi, "Konsep Nasionalisme Perspektif Syaikh Abdul Latief Syakur," *Religia* 280, no. 2 (2019): 267–80, <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2191>.

<sup>17</sup> Nurlira Goncing, "Politik Nahdatul Ulama Dan Orde Baru Nahdatul Ulama Politics and the New Order Era," *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 61–74.

<sup>18</sup> Izzul Madid, "Dinamika Pemikiran Nahdlatul Ulama Dalam Merespons Kepemimpinan Non Muslim di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 13, <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2197>.

Pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa semester pertama telah mengerti sejarah tentang berdirinya Negara Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945 yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan masyarakat yang terdiri dari beragam agama, suku, etnis dan budaya,<sup>19</sup> dengan perbandingan sebagai berikut: mengenal sejarah berdirinya NKRI sebanyak 76,2%, kurang mengenal sejarah sebanyak 23,8%. Dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan, bahwa mahasiswa ketika masih menjadi siswa belum memiliki bekal dengan baik tentang sejarah perjuangan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. kondisi demikian wajar apabila mereka tidak memiliki perasaan nasionalisme dan terkikis nilai-nilai cinta terhadap tanah air dan mudah terombang ambing oleh pengaruh ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideology Pancasila yaitu ideologi ekstrem kanan dan kiri. Ekstrem kanan yang menginginkan berdirinya negara Islam sedangkan ekstrem kiri yang menginginkan berdirinya negara komunis.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa perlu mendapatkan pemahaman sejarah perjuangan bangsa yang utuh melalui pendalaman materi tambahan pada setiap mata kuliah yang disampaikan oleh dosen. Jadi materi kuliah harus dihubungkan dengan mata kuliah dengan disisipkan dalam bentuk perjuangan pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI.

### **Pengenalan Ideologi Pancasila**

Pengenalan terhadap ideologi Pancasila tidak sebatas mengenalkan tentang bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia. Jika pengenalan Pancasila tanpa dibarengi dengan sejarah pembentukan dan biografi para perumusanya, maka sangat membahayakan terhadap cara pandang mahasiswa terhadap eksistensi ideologi Pancasila di masa mendatang. Apalagi serangan ideologi transnasional dengan selalu mengatasnamakan sebagai pejuang syariat Islam, semakin memperlemah minat mahasiswa untuk mendalami ideologi Pancasila dengan baik. Bukti-bukti tersebut bisa dilihat dari hasil penelitian dibawah ini:

<b>No</b>	<b>Jawaban Responden</b>	<b>Prosentasi</b>
1	Mengenal dengan baik	44, 6%
2	Kurang Mengenal	54, 2%
3	Tidak Mengenal	00, 2%

<sup>19</sup> Imam Ghazali, "Penyuluhan Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks NKRI" (Bengkalis, 2021), <https://docs.google.com/forms/d/1oXCT-1mu-1H7qr3j2LNdAG3g3rvRT26tMmKB6TR8-70/edit#responses>.

Jawaban responden tentang pengetahuan riwayat pembuatan ideologi Pancasila sangat besar yaitu 54,2% persen kurang mengenal, dan 44, 6% mengenal dengan baik, sisanya 00,002% tidak mengenal dengan baik. Jika merujuk dari jawaban tersebut, pembelajaran tentang kebangsaan menjadi sangat penting diterapkan kepada siswa-siswa ditingkat dasar sampai SLTA. Namun sungguh ironis, Kurikulum pendidikan yang dirancang untuk siswa di tingkat SLTP dan SLTA hasilnya justru kurang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta terhadap tanah air. Maka wajar, apabila benih-benih radikalisme tumbuh subur di sekolah tingkat atas seperti SMA, SMEA dan Aliyah. Hal ini paling tidak merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian selama Oktober 2010 hingga Januari 2011 juga menunjukkan bahwa 49 persen siswa di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) cenderung setuju menempuh aksi kekerasan untuk menyelesaikan masalah agama dan moral. Lebih ironisnya, menurut pandangan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa kekerasan yang dilakukan remaja khususnya siswa usia sekolah didasari oleh keterlibatan ajaran agama yang diberikan. Sekolah disenyalir telah mengajarkan intoleransi dan mengarahkan siswa untuk memiliki fanatisme terhadap ajaran agama tertentu. Indoktrinasi pendidikan agama terjadi disemua level pendidikan melalui kegiatan yang sistematis, dan anak-anak telah menjadi korban.<sup>20</sup>

Di tingkat Aliyah, pelajaran fikih kelas XII kurikulum 2013 terbitan PT. Toha Putra Semarang<sup>21</sup> mempunyai potensi siswa berbuat intoleransi dan radikal apabila bertemu dengan guru agama yang sudah terjangkit paham radikal. Mata pelajaran *khilafah* dan kemudian disambung dengan bab jihad merupakan suatu rangkaian mata pelajaran yang bernuansa pada gerakan politik yang sering dilakukan oleh para pejuang khilafah yang sering melakukan bom bunuh diri seperti bom Sarinah, bom Panci, bom Buku dan bom Bali.

Ketika peneliti memberikan pertanyaan tentang apakah Pancasila sesuai dengan ajaran Islam, sebagian mengatakan kurang sesuai dengan ajaran Islam. Apabila pertanyaan ini dihubungkan dengan pertanyaan pertama dan kedua, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian mahasiswa tidak mengenal sepenuhnya terhadap ideology pancasila baik ketika mendapatkan pelajaran di sekolah, dan juga ketika masuk di Perguruan Tinggi. Selain itu promosi ideology pancasila sebagai ideologi negara kurang progresif dibandingkan promosi ideologi transnasional yang secara terang-terangan mempromosikan agenda *khilafah islamiyah* dan tegaknya syariat Islam di Indonesia melalui media sosial dan bulletin serta buku berkaitan dengan ideologi tersebut. Berikut hasil jawaban mahasiswa ketika mendapatkan pertanyaan tentang ideologi Pancasila :

---

<sup>20</sup> Moh. Hasim, "Potensi Radikalisme di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2015): 255–68, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v13i2.242>.

<sup>21</sup> Mundzier Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII* (Semarang: Toha Putra, 2016).

NO	JAWABAN RESPONDEN	PROSENTASE
1	Sudah sesuai dengan ajaran Islam	86,9%
2	Kurang sesuai dengan ajaran Islam	10,7%
3	Tidak sesuai dengan ajaran Islam	02,4%

Jika mengacu kepada jawaban tersebut, bahwa mahasiswa sudah bisa memahami makna sila-sila yang ada dalam Pancasila : Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan bagian dari ajaran Islam yang sudah didengar oleh para guru, ustadz, para penceramah dan juga buku-buku atau tulisan yang dibaca oleh mereka. Artinya, secara teori jawaban tersebut tidak membuat kita risau terhadap konsistensi pada ideologi Pancasila. Namun itupun belum bisa menjadi rujukan. Wacana tentang NKRI bersyariah yang digaungkan oleh organisasi eks-FPI juga mengatakan bahwa ideologi Pancasila sesuai dengan ajaran syariah Islam. Namun dalam memberi tafsir berbeda ketika membahas tentang konsitusi dan suksesi kepemimpinan nasional sampai pada daerah. FPI dengan ideologi Pancasila justru ingin membawanya menjadi ideologi eksklusif untuk kelompok Islam secara mayoritas dan menutup hak-hak politik kelompok minoritas.<sup>22</sup>

Sedangkan responden yang menjawab bahwa Pancasila kurang sesuai dengan ajaran Islam sebanyak 10, 7% dan yang memilih tidak sesuai dengan ajaran Islam sebanyak 02,4%. Jawaban ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mempunyai referensi yang cukup berkaitan dengan konsep negara Islam yang dicita-citakan oleh eks-HTI dan eks-FPI. Mereka sudah mempunyai konsistensi politik bahwa politik yang terbaik menurutnya yaitu politik Islam dengan tujuan mendirikan negara Islam dan menegakan syariat Islam. Hal ini bagian dari perintah Tuhan sebagai wujud dari *din wa daulah*. Karena itu, mereka siap berkampanye tentang ajaran khilafah di Media Sosial seperti FB, twitter, instagram dan media-media sosial atau media massa. Mereka dengan secara terus menerus mengkritik pemerintah dari masa-ke masa dan memberi opini kepada masyarakat suatu sistem yang sudah jauh dari ajaran Islam, karena itu berjuang untuk menegakan *khilafah* adalah kewajiban bersama.

### Sistem Khilafah

Ketika mahasiswa ditanya tentang persoalan hubungan antara negara dan agama belum mengenal dengan baik. Apabila dilihat dari latarbelakang pendidikan sebelum masuk perguruan tinggi, mata pelajaran yang memperkenalkan persoalan ini hanya pada pendidikan agama di sekolah umum,

<sup>22</sup> Imam Ghozali, "Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia; Muhammadiyah Dan NU Vs FPI Dan HTI," *Al-Qalam* 37, no. 1 (2020): 27–48.

dan pelajaran fikih di sekolah agama, itupun masih sangat singkat dan tidak menjelaskan secara komprehensif. Sedangkan mata pelajaran yang lebih menjurus pada persoalan tersebut yaitu pelajaran kewarganegaraan. Ini yang menyebabkan mahasiswa pada semester pertama tidak mengenal dengan baik persoalan hubungan agama dan negara, termasuk hubungan negara dengan konsep NKRI, Kerajaan, dan sistem Khilafah. Berikut ini jawaban-jawaban berkaitan dengan hubungan antara negara dan agama :

No	Jawaban Responden	Prosentase
1	Ada sistem selain khilafah	30,5%
2	Kurang tahu	52,7%
3	Khilafah satu-satunya sistem negara Islam	16,8%

Berdasarkan jawaban tersebut responden belum memahami secara mendalam tentang persoalan politik, negara dan agama. jawaban responden bahwa “ada sistem selain khilafah” berjumlah 30, 5% karena melihat fakta bahwa negara Indonesia tidak menganut sistem khilafah. Padahal mayoritas beragama Islam. Sedangkan responden yang menjawab “ kurang mengetahui” sebanyak 52, 7% menggambarkan pengetahuan mereka tidak mengerti persoalan-persoalan politik. Baik jawaban responden pertama dan kedua menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan persoalan-persoalan isu-isu politik yang berkembang saat seperti ini berkaitan dengan keinginan perubahan sistem kenegaraan yang ada di berbagai media sosial dan bahan-bahan bacaan. Sedangkan yang menjawab “khilafah sebagai satu-satunya sistem politik Islam” sebanyak 16,8% sudah menunjukkan adanya kebiasaan membaca dan mengikuti perkembangan politik melalui media sosial, pengajian dan bacaan-bacaan melalui bulletin atau buku.

Keadaan realita di lapangan tersebut, bahwa pencegahan paham radikalisme menjadi sangat penting di kalangan mahasiswa. Kurikulum agama yang secara substansional mengenalkan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh kadang akan dengan mudah tersusupi pemikiran mengarah kepada ekstrem kanan dengan materi anti-radikalisme.<sup>23</sup> Perombakan kurikulum dan materi sudah menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam memberikan pemahaman bahwa ajaran Islam bukan sebatas tekstual saja yang secara prakteknya juga melahirkan suatu keberagaman sudut pandang secara hokum, tapi juga perlu memberikan suatu ajaran pentingnya memberikan ajaran kebaikan secara

<sup>23</sup> Pengaruh Misi et al., “Terhadap Perilaku Anti-Radikalisme Mahasiswa The Impact Of University ’ S Mission , Curriculum , And Leadership Toward Students ’ View Of Anti-Radicalism” 3, no. 2013 (2018): 33–43.

universal yang siap menerima perbedaan dalam cara pandang ajaran agama tanpa harus menyisipkan ucapan-ucapan yang ekstrem seperti ahli bid'ah, pelanggar syariah, syirik, dan kafir.

Memahami Islam *inklusif* terutama kepada mahasiswa berarti memberikan ruang secara terbuka bagi mahasiswa untuk berfikir kritis dan forum-forum diskusi sebagai tradisi intelektual yang telah diwariskan oleh para generasi Islam saat mencapai puncak kejayaan. Tanpa adanya ruang diskusi yang utuh dan terbuka, agama bisa terjebak sebagai dogma terbelakang dan tidak responsive terhadap perubahan dan seringkali terkesan tidak selaras dengan perkembangan zaman. Padahal ayat-ayat al-Qur'an telah memberikan pelajaran untuk melakukan dialog dan menggunakan akal dalam mengkaji firman-firman Allah sebagai jalan mendapatkan kebenaran. Ketika tradisi ini terbentuk, maka tradisi perbedaan menjadi suatu yang menyenangkan dan bagian dari kekayaan intelektual untuk saling melengkapi. Ini yang oleh Abdurrahman Wahid diutililahkan dengan pertarungan nafsu *mutmainah* dan nafsu *syayiah* dalam diri manusia. Ketika nafsu *mutmainah* menang, maka keberagaman menjadi indah, tapi ketika nafsu *syayiah* menang maka yang terjadi berupa sikap reaksioner terhadap perbedaan dan menjustifikasi dengan kalimat yang sangat tidak bermartabat.<sup>24</sup>

Pertarungan antara nafsu *mutmainah* dan nafsu *syayiah* dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan yaitu adanya persoalan kedudukan "syariah" yang satu sisi menginginkan adanya sikap "universalisme" dengan mengakomodir seluruh komponen masyarakat yang multicultural dan agama, satu sisi ingin "menang sendiri" dengan memaksakan masyarakat lain untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran Islam.

Maka memberi pemahaman tentang hakikat agama dan negara kepada mahasiswa yang sudah berkembang di ruang publik sudah saatnya dilakukan oleh para dosen melalui sela-sela menyampaikan mata kuliah. Kolaborasi mata kuliah dengan nilai-nilai semangat nasionalisme sebagai "*hub al-wathan min al-iman*", cinta negara sebagian dari iman sudah saatnya perlu ditanamkan agar mahasiswa tidak kehilangan patriotism. Sebab ketika mereka sudah kehilangan rasa tersebut, maka sudah melemah rasa memiliki negara. ini ancaman serius untuk eksistensi NKRI di masa mendatang.

Diantara bukti bahwa mahasiswa belum memahami relasi antara hukum agama dan negara bisa dilihat ketidakmampuan menjawab pertanyaan antara konstitusi negara dan hukum Islam. Mereka menilai bahwa agama yang dipahami dalam konstitusi adalah hukum fikih yang diterapkan dalam negara-negara Islam seperti cambuk, rajam, potong tangan dan sejenisnya. Hal ini terlihat pada jawaban-jawaban mahasiswa di bawah ini :

---

<sup>24</sup> Abdurrahman dan Daisaku Ikeda Wahid, "Dialog Peradaban Untuk Toleransi Dan Perdamaian" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 170.

No	Jawaban Responden	Prosentase
1	Sudah mengakomodir	48,8%
2	Belum mengakomodir	47,6%
3	Tidak mengakomodir	03,6%

Jawaban responden tersebut sudah bisa dibaca bahwa pemahaman tentang syariah Islam yang tidak utuh akan menimbulkan persoalan serius pada mahasiswa, apalagi jika mereka sudah diseret pada kepentingan politik identitas dengan menggunakan isu-isu agama sebagai jalan untuk melakukan misi politiknya. Ini yang kemudian melahirkan generasi yang kehilangan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, namun pola pikir dan perilakunya sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Islam model masyarakat Indonesia yang moderat, toleran dan siap menerima perbedaan.<sup>25</sup>

Tentu saja ketika meminta kepada mahasiswa yang mengatakan bahwa negara Indonesia belum mengakomodir hukum Islam akan mengalami kesulitan untuk memberi jawaban yang lugas, logis melalui analisis ilmiah. Mereka merespon terhadap dinamika persoalan di Media Sosial yang menyuguhkan pertarungan ideology antara agama dan nasionalisme membuat mereka melakukan pilihan-pilihan untuk menunjukkan diri sebagai kelompok yang peduli terhadap agamanya. Padahal, teknik ini merupakan cara yang dilakukan oleh para pendukung ideologi transnasional melalui pertarungan pemikiran, sehingga mahasiswa mengalami kebingungan dan kegalauan bersfikir dan bersikap. Kondisi yang labil ini yang sangat mudah terjebak pada pemikiran-pemikiran yang kemudian hari menjadi tidak toleran terhadap keberagaman yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyuluhan kepada mahasiswa dengan beragam bentuk sudah menjadi tanggungjawab bersama secara kolektif dalam rangka memperkuat semangat patriotisme agar mempunyai rasa memiliki terhadap NKRI sebagai negara hasil perjuangan para ulama, suhada dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengorbankan jutaan nyawa dan harta benda yang tidak terhitung jumlah.

## Penutup

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, maka peneliti bisa menyimpulkan tiga point penting, yaitu: pertama, adanya kegagalan lembaga pendidikan tingkat SLTA dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Kegagalan ini disebabkan karena simpul-simpul pendidikan agama di SLTA seperti Rohis dan guru agama

<sup>25</sup> Abdurrahman Wahid, "Islamku, Islam Anda dan Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi," (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 1-451.

sudah mengalami pergeseran berfikir makna ajaran Islam dari yang substantif menuju formalistik. Kedua, penyuluhan pemahaman terhadap ajaran nasionalisme dalam berbangsa dan bernegara perlu dihidupkan secara konsisten dalam setiap mata kuliah di perguruan tinggi. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi pemahaman agama yang ekstrem berjumlah sekitar 16 %, dan menjaga mahasiswa yang belum terkena paham tersebut semakin kuat dan siap menghadapi gempuran paham intoleransi atas nama agama di Perguruan Tinggi. Ketiga, pendalaman pemahaman Islam inklusif masih menjadi jalan efektif untuk mengenalkan Islam secara baik kepada mahasiswa. Pengenalan yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus sehingga mereka benar-benar memahami secara totalitas, dengan harapan cara berfikir mereka menjadi lebih moderat, toleran dan siap menerima perbedaan dalam konteks yang lebih luas yaitu berbangsa, bernegara dan beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Reza Hutama AL-Faruqi, Martin Putra Perdana. "Problem Pluralisme Agama Di Indonesia." *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2021): 64–70.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd, Qadzaf, Pencurian." In *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1–742. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Bakri, Maskuri. "Respon Nahdlatul Ulama Terhadap Gempuran Aliran Fundamental; Telaah Kritis Radikalisme Intoleran Dan Pudarnya Moderatisme Islam." *Tribakti* 32, no. 1 (2021): 17–34.
- Engineer, Asghar Ali. "Islam Dan Teologi Pembebasan, Penerjemah; Agung Prihantoro," 33. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nkri)." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 251. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.
- Firdaus, Robitul. "Nasionalisme 'Jalan Tengah': Mengurai Potensi Benturan Ideologi Nasionalisme Dan Sentimen Ummah Di Era Nation State." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2018): 307. <https://doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1105>.
- Ghozali, Imam. "Aliran Pemikiran Politik Islam Indonesia; Muhammadiyah Dan NU Vs FPI Dan HTI." *Al-Qalam* 37, no. 1 (2020): 27–48.
- . "Memahami Format Demokrasi Model Khawarij di Indonesia ( Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2019 )," 2019, 17–25.
- . "Penyuluhan Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks NKRI." Bengkalis, 2021. <https://docs.google.com/forms/d/1oXCT-1mu-1H7qr3j2LNdAG3g3rvRT26tMmKB6TR8-70/edit#responses>.
- Goncing, Nurlira. "Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru Nahdatul Ulama

- Politics and the New Order Era.” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 1, no. 1 (2015): 61–74.
- Halu, Universitas, and Oleo Kendari. “Ideologi , Keyakinan , Doktrin dan Bid ’ Ah Khawarij : Kajian Teologi Khawarij Zaman Modern” 27 (2016): 411–30.
- Hasim, Moh. “Potensi Radikalisme di Sekolah Studi Terhadap Buku Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 13, no. 2 (2015): 255–68.  
<https://doi.org/10.32729/edukasi.v13i2.242>.
- Hilmy, Masdar. “Akar-Akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2014): 1.  
<https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>.
- Madid, Izzul. “Dinamika Pemikiran Nahdlatul Ulama Dalam Merespons Kepemimpinan Non Muslim Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 13.  
<https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2197>.
- Madjid, Nurcholish. “Islam Kemodernan Dan Keindonesiaan,” 38–39. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Misi, Pengaruh, D A N Kepemimpinan, D I Perguruan, and Saifuddin Chalim. “Terhadap Perilaku Anti-Radikalisme Mahasiswa The Impact Of University ’ S Mission , Curriculum , And Leadership Toward Students ’ View Of Anti-Radicalism” 3, no. 2013 (2018): 33–43.
- Puadi, Hairul. “Radikalisme Islam : Studi Doktrin Khawarij.” *Jurnal Pusaka*, 2016, 43–53.
- Ritaudin, M Sidi. “Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global” 8 (2001): 389–414.
- Rosana, Ellya. “Agama dan Sekularisasi Pada Masyarakat Moderen.” *Al-Adyan* 13, no. 1 (2018): 135–51.
- Sadjali, Munawir. “Islam Dan Tata Negara Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran.” In *UI-Press*, 140. Jakarta, 2011.
- Suryaningrum, Dirana Sofiah. “Pandangan Anggota Rohis Sma Tentang Radikalisme Agama (Studi Komparatif Rohis Sma Labschool Jakarta dan Smkn 26 Jakarta di Rawamangun).” *Risenologi* 2, no. 2 (2017): 90–97.
- Wahid, Abdurrahman. “Islamku, Islam Anda Dan Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi,” Cetakan Pe., 1–451. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Wahid, Abdurrahman dan Daisaku Ikeda. “Dialog Peradaban Untuk Toleransi Dan Perdamaian,” 170. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Wahidi, Ridhoul. “Konsep Nasionalisme Perspektif Syaikh Abdul Latief Syakur.” *Religia* 280, no. 2 (2019): 267–80.  
<https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2191>.
- Zainuddin, Mundzier Suparta dan Djedjen. *Pendidikan Agama Islam Fikih Madrasah Aliyah Kelas XII*. Semarang: Toha Putra, 2016.

